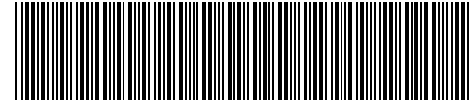




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692999/2026**



DS:1765-8504-4048-9746

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03

Tanggal : 13 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 3. Provinsi : (09) RIAU
 4. Kode>Nama Satker : (692999) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
- Sebesar : Rp. 2.223.070.000 (DUA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.223.070.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.223.070.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.223.070.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 2.223.070.000

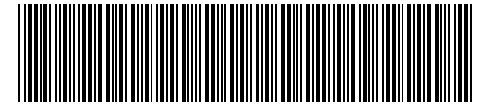
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692999) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

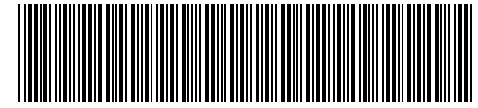
Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.223.070.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.223.070.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.000,00	orang	288.986.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01 Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual	1000.00	orang	288.986.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	1.441.434.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	1.152.987.000
		02	BAH.002 Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.00	layanan	288.447.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik	2,00	dokumen, Peta, Data	492.650.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah	2.00	Data	492.650.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692999) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

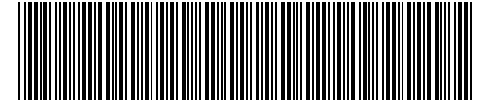
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692999	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	-	2.223.070	-	-	-	2.223.070		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.223.070	-	-	-	2.223.070		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.223.070	-	-	-	2.223.070		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	288.986	-	-	-	288.986	09 . 51	
04	PNBP	-	288.986	-	-	-	288.986	008@	
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	1.441.434	-	-	-	1.441.434	09 . 51	
04	PNBP	-	1.441.434	-	-	-	1.441.434	008@	
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	492.650	-	-	-	492.650	09 . 51	
04	PNBP	-	492.650	-	-	-	492.650	008@	
JUMLAH		-	2.223.070	-	-	-	2.223.070		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692999) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

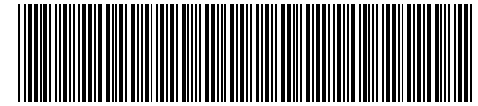
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692999	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	182.653	177.135	110.431	121.564	126.231	154.396	151.235	154.402	118.435	124.356	802.232	2.223.070
		BELANJA BARANG	0	182.653	177.135	110.431	121.564	126.231	154.396	151.235	154.402	118.435	124.356	802.232	2.223.070
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	182.653	177.135	110.431	121.564	126.231	154.396	151.235	154.402	118.435	124.356	802.232	2.223.070
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	182.653	177.135	110.431	121.564	126.231	154.396	151.235	154.402	118.435	124.356	802.232	2.223.070

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
IV A. B L O K I R**



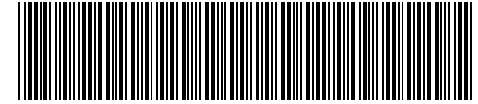
DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [692999] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692999	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.221
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 787.426		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 787.426	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.700
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.742	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.451
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.446
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.969
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 67.236	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.686
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.676		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.261
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522141	Belanja Sewa(PNBP)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
IV A. B L O K I R**



DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [692999] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

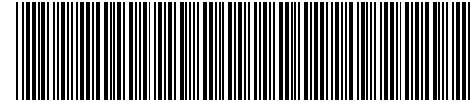
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7121.BMA	Data dan Informasi Publik		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 10.183	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 153.694	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 18.445	

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692999/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:1765-8504-4048-9746

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [692999] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001